

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Supriyono (2018) dalam Nirmanggi dan Muslih (2020), “*agency theory* atau yang dikenal sebagai teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) yang berperan sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen”. “Teori keagenan merupakan teori yang menghasilkan cara penting untuk menjelaskan adanya kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang kemudian menjadi suatu rintangan” (Sudaryo *et al.*, 2017 dalam Nirmanggi dan Muslih, 2020). “Teori agensi menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak dengan satu orang atau lebih yang bertindak sebagai prinsipal (pemegang saham/*shareholder*) menunjuk orang lain sebagai agen (manajer) untuk melakukan jasa bagi kepentingan prinsipal, termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan kepada agen” (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Lahaya, 2017).

“Manajer seharusnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sedangkan pada kenyataannya manajer cenderung memilih dan melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingannya sendiri sehingga dapat memicu adanya tindakan-tindakan yang tidak semestinya (*dysfunctional behavior*) untuk dilakukan manajer” (Suhartono dan Hendraswari, 2020).

Eisenhardt (1989) dalam Suhartono dan Hendraswari (2020), menyatakan ada “tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan, yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*)”.

“Teori agensi mengasumsikan bahwa prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, perusahaan secara keseluruhan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan prinsipal. Hal inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen yang disebut sebagai asimetri informasi” (Yuliani *et al.*, 2017). “Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. *Agency Theory* mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*)” (Junaidi, 2018).

Menurut Scott (2015), terdapat “2 jenis asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse selection*

*Adverse selection* adalah tipe asimetri informasi yakni satu orang atau lebih pelaku transaksi bisnis atau transaksi usaha yang potensial mempunyai informasi lebih dari pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer dan pihak-pihak internal perusahaan lainnya lebih mengetahui kondisi saat ini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada investor.

2. *Moral hazard*

*Moral hazard* adalah tipe asimetri informasi yakni satu orang atau lebih pelaku kontrak dapat mengamati kegiatan-kegiatan mereka untuk memenuhi kontrak, namun pihak lainnya tidak. *Moral hazard* muncul saat satu pihak dari hubungan kontraktual melakukan kegiatan yang tidak dapat diketahui oleh pihak lain dalam kontrak”.

“Dalam teori keagenan, manajer adalah pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan dan untuk kepentingan pemegang saham. Keinginan dari pemegang saham adalah perusahaan mempunyai kinerja baik yang dapat tercermin dari laba yang dihasilkan setiap periodenya, kestabilan laba menunjukkan kestabilan kinerja dan mampu menghadapi risiko yang ada. Hal tersebut dapat memungkinkan manajemen untuk melakukan perataan laba” (Lahaya, 2017).

“Dalam hal ini manajemen selaku pihak yang telah diberi wewenang dan kepercayaan penuh oleh *principal* untuk mengelola bisnis perusahaan sering kali merasa terbebani dalam menghadapi tekanan-tekanan untuk memenuhi target kerja jangka pendek. Karena tekanan-tekanan inilah yang pada akhirnya akan memaksa manajemen untuk selalu melakukan perubahan-perubahan strategi bisnis maupun melakukan *earning management* dalam proses pelaporan keuangannya. Pentingnya informasi laba disadari oleh manajemen, sehingga manajemen cenderung melakukan *disfunctional behaviour* (perilaku tidak semestinya) yang dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi dalam konsep teori keagenan. Dimana tiap-tiap pihak, baik *principal* maupun *agent* mempunyai perbedaan kepentingan dan ingin memperjuangkan kepentingannya masing-masing, selain itu *agent* memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan *principal*. Sehingga mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba atau manipulasi atas laba dalam bentuk perataan laba” (Yunengsih *et al.*, 2018). “Manajemen laba terjadi karena beberapa alasan, seperti untuk meningkatkan kompensasi, menghindari perjanjian utang, memenuhi perkiraan analis, dan memengaruhi harga saham dengan melakukan perubahan pada metode akuntansi dan perubahan pada estimasi dan kebijakan akuntansi” (Subramanyam, 2017).

“Dalam konteks kompensasi manajerial maka upaya perataan laba ini dilakukan manajer agar setiap periode dapat selalu memperoleh bonus yang dijanjikan pemilik perusahaan, apalagi jika bonus dihitung berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Manajer akan meratakan laba agar laba yang dilaporkan tidak melebihi batas atas (*cap*) dan tidak kurang dari batas bawah (*boogey*) untuk memperoleh bonus sebab kelebihan laba itu tidak akan dipakai lagi untuk menentukan besarnya bonus yang dapat diterima manajer. Sedangkan kelebihan laba yang belum dilaporkan pada periode berjalan akan dilaporkan pada periode berikutnya, sehingga dalam setiap periode manajer dapat memperoleh bonus yang dijanjikan pemilik perusahaan” (Sulistyanto, 2018).

## 2.2 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- (a) Aset;
- (b) Liabilitas;
- (c) Ekuitas;
- (d) Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- (e) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- (f) Arus kas”.

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan, “laporan keuangan lengkap terdiri dari:

### 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut: aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang usaha dan piutang lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, utang usaha dan utang lain, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini, liabilitas dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, kepentingan non pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan modal

saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk” (IAI, 2018 dalam PSAK 1).

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. “Bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:
  - a. Pendapatan, disajikan terpisah dengan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.
  - b. Biaya keuangan
  - c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
  - d. Beban Pajak
  - e. Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan” (IAI, 2018, dalam PSAK 1).

“Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah selama periode:

- a. Pos-pos penghasilan komprehensif lain yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK:
  - 1) Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi.
  - 2) Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi” (IAI, 2018, dalam PSAK 1).
- b. “Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas, dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK:
  - 1) Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi.
  - 2) Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi” (IAI, 2018 dalam PSAK 1).

Menurut Weygandt *et al.* (2019), menyatakan bahwa “laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan pengeluaran dan menghasilkan laba bersih atau rugi bersih untuk periode waktu tertentu”. Menurut Kieso *et al.* (2018) “laporan laba rugi bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja masa lalu

perusahaan, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, dan membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan”. Kieso *et al.* (2018) menyatakan “dalam laporan laba rugi perusahaan secara umum menyajikan beberapa atau semua bagian dan total, yaitu:

- a. *Sales* atau *revenue*. Menyajikan penjualan, diskon, *allowances*, retur dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan jumlah penjualan atau pendapatan bersih.
- b. *Cost of goods sold*. Menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan.
- c. *Gross profit*. Pendapatan dikurang harga pokok penjualan.
- d. *Selling expenses*. Melaporkan beban yang dikeluarkan perusahaan dari usaha perusahaan untuk melakukan penjualan.
- e. *Administrative or general expenses*. Melaporkan beban administrasi dan umum.
- f. *Other income and expenses*. Termasuk transaksi lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori harga pokok penjualan atau beban administrasi dan umum. Seperti kerugian atau keuntungan penjualan aset, *impairment asset*, dan biaya restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini. Pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga juga seringkali dilaporkan.
- g. *Income from operations*. Pendapatan perusahaan dari kegiatan operasi.
- h. *Financing cost*. Bagian terpisah yang mengidentifikasi *financing cost* dari perusahaan, disebut juga *interest expense*.
- i. *Income before income tax*. Total pendapatan sebelum pajak.
- j. *Income tax*. Bagian singkat yang melaporkan pajak yang dibayarkan dari pendapatan sebelum pajak.
- k. *Income from continuing operations*. Hasil perusahaan sebelum laporan keuntungan atau kerugian penghentian usaha. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian ataupun usaha yang dihentikan, maka bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah di atas akan menjadi *net income*.



- l. *Discontinued operations*. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan akibat adanya penghentian usaha.
  - m. *Net income*. Hasil bersih kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu.
  - n. *Non-controlling interest*. Menyajikan alokasi dari *net income* kepada pemegang saham mayoritas dan kepada pemegang saham minoritas.
  - o. *Earnings per share*. Laba per lembar saham yang dilaporkan.
3. “Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:
- a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali.
  - b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif.
  - c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri (paling sedikit) mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian” (IAI, 2018 dalam PSAK 1).
4. “Laporan arus kas selama periode.
- Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut” (IAI, 2018 dalam PSAK 1).
5. “Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
- Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa saja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan

atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut” (IAI, 2018 dalam PSAK 1).

6. “Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan” (IAI, 2018 dalam PSAK 1).
7. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya” (IAI, 2018 dalam PSAK 1).

Menurut Weygandt *et al* (2019), “pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua kelompok:

a. *Internal users*

Pengguna internal laporan keuangan adalah manajer-manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis. *Internal user* terdiri dari manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan.

b. *External users*

Pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan. Dua jenis pengguna eksternal laporan keuangan yang paling umum adalah investor dan kreditur. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham kepemilikan suatu perusahaan. Kreditur menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau peminjaman uang”.



Menurut BEI (2021), “pihak-pihak yang terlibat dalam mempublikasikan laporan keuangan pada Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Terbuka yaitu:

1. Komisaris Independen. “Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan perusahaan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen” (POJK Pasal 1 ayat 6 Nomor 57, 2017).
2. Dewan Komisaris. “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi” (POJK Pasal 1 ayat 5 Nomor 57, 2017).
3. Direktur Independen minimal 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi. “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar” (POJK Pasal 1 ayat 4 Nomor 57, 2017).
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar” (POJK Pasal 1 ayat 3 Nomor 57, 2017).
5. Komite Audit. “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris” (POJK Pasal 1 ayat 1 Nomor 55, 2015).
6. Unit Audit Internal. “Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam emiten atau perusahaan publik yang menjalankan fungsi audit internal. Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan

memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan” (POJK Pasal 1 ayat 1 Nomor 56, 2015).

7. Sekretaris Perusahaan. “Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan” (POJK Pasal 1 ayat 1 Nomor 35, 2014).

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ada beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan laporan keuangan, pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 66 ayat 1 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir”. Pada ayat 2 berisi, “laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat sekurang-kurangnya:

1. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.
2. Laporan mengenai kegiatan perseroan.
3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha perseroan.
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru.
6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau”.

“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 1 ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris

yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham” (UU RI Pasal 67 ayat 1 Nomor 40, 2007). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 68 ayat 1 Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “direksi wajib menyerahkan laporan keuangan pada akuntan publik untuk diaudit. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan perseroan yang mengharapkan pembiayaan dari pasar modal”.

“Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok” (IAI dalam PSAK 25, 2018).

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 25, “entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut:

- (a) disyaratkan oleh suatu PSAK; atau
- (b) menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas”.

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 25, “penerapan perubahan kebijakan akuntansi:

- (a) entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut, jika ada; dan
- (b) jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif”.

“Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya” (IAI dalam PSAK 25, 2018).

### **2.3 Manajemen Laba**

“Manajemen laba merupakan permainan manajerial yang dilakukan dengan berbagai macam cara untuk mengatur besar kecilnya laba perusahaan. Manajemen laba menjadi upaya manajemen perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan. Tujuannya yaitu untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan” (Sulistyanto, 2018). Sedangkan menurut Fischer dan Rosenzweig (1995) dalam Dewi dan Suryanawa (2019), “manajemen laba adalah serangkaian langkah yang dilakukan manajer dalam mengatur jumlah laba tahun berjalan dengan cara meningkatkan atau menurunkan laba”.

Menurut Subramanyam (2017), “ada beberapa alasan lain untuk mengelola laba. Laba terkadang diturunkan untuk mengurangi biaya politik dan pengawasan dari badan pemerintah. Selain itu, perusahaan mungkin menurunkan laba untuk memperoleh bantuan pemerintah, seperti subsidi dan perlindungan dari persaingan luar negeri”. “Manajemen perusahaan dapat melakukan tindak manajemen laba dengan dua cara, yaitu dengan mengubah metode akuntansi dan mengubah estimasi

kebijakan akuntansi yang akan memengaruhi angka akuntansi. Hal ini memberikan kebebasan bagi manajer untuk membuat atau menetapkan angka akuntansi yang disajikan” (Yunietha dan Palupi, 2019).

Menurut Subramanyam (2017), “2 metode utama manajemen laba yaitu:

1. Pergeseran laba

Pergeseran laba atau *income shifting* merupakan proses pengelolaan laba dengan mengalihkan laba dari satu periode ke periode lainnya. Pergeseran laba dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Bentuk manajemen laba biasanya mengakibatkan pembalikan dari dampak dalam satu atau lebih periode di masa depan, sering kali pada periode berikutnya.

2. Klasifikasi manajemen laba

Laba juga dikelola dengan mengklasifikasikan beban dan pendapatan secara selektif pada bagian-bagian tertentu dari laporan laba rugi”.

Menurut Pratiwi dan Diana (2018), “untuk mendeteksi ada atau tidaknya manajemen laba, maka pengukuran atas akrual sangat penting untuk dilakukan”. Menurut Sulistyanto (2018), “manajemen laba dilakukan dengan memanipulasi komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya memanipulasi besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan”.

Menurut Sulistyanto (2018), “ada tiga target permainan dalam manajemen laba, yaitu:

1. Meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi

Permainan manajerial ini bisa dilakukan dengan meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi yang selama ini telah digunakan perusahaan. Sebagai contoh adalah umur ekonomis aset tetap (*tangible assets*) dan aset tidak berwujud (*intangible assets*), prosentase biaya kerugian piutang, dan lain-lain. Perubahan estimasi akuntansi ini memang diperbolehkan dan diakui oleh prinsip akuntansi berterima umum meski sebenarnya rawan menjadi objek permainan penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu agar

semua perubahan estimasi akuntansi ini dapat diketahui oleh pemakai laporan keuangan maka standar akuntansi mensyaratkan bahwa perubahan ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*).

2. Mengubah atau mengganti metode akuntansi

Secara konseptual manajer mempunyai kebebasan untuk mengubah atau mengganti metode akuntansi yang selama ini dipakainya dengan metode akuntansi lain. Hal inilah yang mendorong atau memotivasi seorang manajer untuk mengoptimalkan kepentingan dan kesejahteraan pribadi. Seorang manajer hanya mau menggunakan suatu metode akuntansi tertentu apabila ada manfaat yang bisa diperoleh. Hingga metode akuntansi yang tidak memberi manfaat jika digunakan dalam melaporkan kinerja tidak akan digunakan atau diganti dengan metode lain oleh manajer bersangkutan.

3. Permasalahan cadangan

Secara konseptual cadangan (*reserves*) merupakan “laba yang ditarik kebelakang dari periode pengakuan sesungguhnya dan menggunakan pada saat dibutuhkan”. Sebagai contoh adalah cadangan kerugian piutang, penurunan nilai persediaan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, pada saat menginginkan labanya menjadi lebih tinggi maka perusahaan dapat menggunakan cadangan itu untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya itu”.

Menurut Sulistyanto (2018), “ada beberapa komponen laporan keuangan yang mudah untuk dipermainkan dengan memanfaatkan kebebasan dalam memilih metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi, yaitu:

1. Aset lancar

Terdapat 4 komponen utama aset lancar yang selama ini dikenal dan dipakai sebagai objek rekayasa manajerial secara umum, yaitu:

a. Kas dan setara kas

Kas adalah aset lancar yang paling mudah dan sering disalahgunakan, sesuai dengan sifatnya yang mudah untuk dipakai atau dibelanjakan.



b. Piutang

Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain karena perusahaan telah menjual produknya kepada pihak lain secara kredit (non tunai).

c. Persediaan

Persediaan merupakan barang-barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali dalam operasi normal perusahaan (persediaan barang dagangan) atau untuk diproses lebih lanjut sebelum dijual dalam operasi normal perusahaan (persediaan bahan baku).

d. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka (*deferred charge*) adalah biaya yang telah dikeluarkan perusahaan secara tunai untuk memperoleh barang atau jasa tertentu yang baru akan diterima dimasa depan.

2. Aset tetap

Aset tetap (*fixed assets*) merupakan harta perusahaan yang mempunyai wujud fisik, dipakai dalam operasi normal perusahaan, dimiliki perusahaan lebih dari satu periode akuntansi, dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

3. Utang lancar

Utang (*liabilities*) merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan di masa depan dalam bentuk penyerahan barang atau jasa yang disebabkan transaksi atau peristiwa di masa lalu. Ada beberapa jenis utang yang dapat diklasifikasikan sebagai utang lancar, yaitu:

a. Utang dagang

Utang dagang merupakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan dan menyerahkan sejumlah kas secara tunai kepada pihak lain yang harus diselesaikan dimasa depan karena perusahaan telah melakukan pembelian barang atau menerima jasa secara kredit.

b. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban perusahaan untuk penyerahan barang atau jasa kepada pihak yang harus diselesaikan dimasa

depan karena perusahaan telah menerima sebagian atau keseluruhan pembayaran secara tunai dari pihak lain itu.

c. Biaya yang masih harus dibayar

Biaya yang masih harus dibayar merupakan kewajiban perusahaan berupa pengeluaran dan pembayaran kas secara tunai kepada pihak lain yang harus diselesaikan dimasa depan karena perusahaan telah menerima barang atau jasa dari pihak lain itu.

d. Utang jangka panjang yang jatuh tempo

Utang jangka panjang yang jatuh tempo merupakan kewajiban perusahaan berupa pengeluaran dan pembayaran kas secara tunai kepada pihak lain yang harus diselesaikan dimasa depan karena utang jangka perusahaan telah jatuh tempo.

e. Utang pajak

Utang pajak merupakan kewajiban perusahaan berupa pengeluaran dan pembayaran kas secara tunai dimasa depan kepada pemerintah yang harus diselesaikan dimasa depan karena perusahaan mempunyai tunggakan sejumlah pajak.

f. Utang dividen

Utang dividen adalah kewajiban berupa pengeluaran dan pembayaran kas kepada pemegang saham yang harus diselesaikan dimasa depan karena perusahaan mempunyai janji untuk membagikan sejumlah dividen kepada pemegang sahamnya”.

Praktik manajemen laba sendiri memiliki beberapa pola dan jenis yang beragam. Scott (2012) dalam Pratiwi dan Diana (2018) menjelaskan “pola manajemen laba terbagi menjadi empat macam:

1. *Taking a bath*

*Taking a bath* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya.

## 2. *Income minimization*

*Income minimization* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba di laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sebenarnya.

## 3. *Income maximization*

*Income maximization* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba di laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada laba sebenarnya.

## 4. *Income smoothing*

*Income smoothing* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau *smooth*) dari periode ke periode. Dalam hal ini, manajemen dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi fluktuasi dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi, serta bonus yang didapatkan manajemen relatif konstan”.

### **2.4 Perataan Laba**

“Perataan laba merupakan pengurangan fluktuasi laba dengan memindahkan pendapatan dari tahun yang tinggi pendapatannya ke periode yang kurang menguntungkan” (Riahi dan Belkaoui, 2011 dalam Nugraha dan Dillak, 2018). Sedangkan menurut Ghozali dan Chariri (2007) dalam Lahaya (2017), “perataan laba dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan yang disengaja dalam hal meratakan atau memfluktuasikan tingkat nilai laba sehingga laba pada kondisi sekarang terlihat dan dipandang normal bagi suatu perusahaan”. Berdasarkan penelitian Eckel (1981) dalam Suhartono dan Hendraswari (2020) “terdapat dua tipe perataan laba, yaitu:

1. Perataan alami (*natural smoothing*) adalah perataan laba yang terjadi akibat proses laba secara inheren menghasilkan aliran laba yang merata.
2. Perataan disengaja (*intentionally smoothing*) adalah tipe perataan laba yang disengaja dan dipengaruhi oleh tindakan manajemen. Perataan disengaja merupakan hasil dari perataan laba riil (*real smoothing*) yaitu perataan laba

yang terjadi apabila manajemen mengambil tindakan untuk menyusun kejadian-kejadian ekonomi sehingga menghasilkan aliran laba yang rata. Contohnya seorang manajer memutuskan mengeluarkan sejumlah uang atau dana untuk biaya riset dan pengembangan suatu tahun tertentu dan perataan laba artifisial (*artificial smoothing*) yaitu merupakan perataan laba dengan menerapkan prosedur akuntansi untuk memindahkan biaya dan atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya”.

Menurut Belkaoui (2007) dalam Djoko BS dan Tahu (2017), “terdapat tiga batasan yang mungkin memengaruhi para manajer untuk melakukan perataan adalah:

1. Mekanisme pasar yang kooperatif yang mengurangi jumlah pilihan yang tersedia bagi manajemen.
2. Skema kompensasi manajemen yang terhubung langsung dengan kinerja perusahaan.
3. Ancaman penggantian manajemen”.

“Tindakan perataan laba, diukur dengan menggunakan *Indeks Eckel*. *Indeks Eckel* membedakan antara perusahaan-perusahaan yang melakukan perataan laba dengan yang tidak melakukan perataan laba. Laba yang digunakan untuk menghitung *Indeks Eckel* adalah *net income*” (Widana dan Yasa, 2013 dalam Lahaya, 2017). “Perataan laba diuji dengan *Indeks Eckel* menggunakan *Coefficient Variation (CV)* laba bersih dan penjualan” (Nugraha dan Dillak, 2018).

“Nilai *Indeks Eckel* yang lebih besar atau sama dengan 1 artinya perubahan pada laba lebih besar atau sama dengan perubahan pada penjualan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dikategorikan melakukan perataan laba. Jika nilai *Indeks Eckel* lebih kecil dari 1, maka perusahaan dikategorikan melakukan perataan laba. Maksud dari model ini berarti apabila terdapat perubahan yang terjadi pada penjualan seharusnya akan menghasilkan perubahan yang lebih besar pada laba” (Othman, 2019). “Semakin fluktuatif *net income*, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya pelanggaran perjanjian. Hal tersebut akan menambah dorongan untuk mengurangi fluktuasi *net income* yang dilaporkan untuk meratakan rasio perjanjian dari waktu ke waktu. *Income smoothing* dapat mengurangi

kemungkinan pelaporan laba yang rendah. Akibatnya, perusahaan dapat meratakan *net income* yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal. Jika digunakan dengan benar, *income smoothing* dapat menyampaikan informasi perusahaan ke pasar dengan memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan *persistent earning power* secara kredibel” (Scott, 2015). “Strategi perataan laba dapat dilakukan dengan cara manajemen yang dapat menetapkan waktu terjadinya peristiwa tertentu untuk mengurangi perbedaan laba yang dilaporkan, manajemen dapat mengalokasikan pendapatan dan beban tertentu dalam periode akuntansi yang berbeda, dan manajemen atas kebijakannya dapat mengklasifikasikan pos laba tertentu ke dalam kategori yang berbeda” (Ronen dan Sadan, 1989 dalam Budhi *et al.*, 2018). “Tujuan yang ingin dicapai perusahaan adalah untuk meningkatkan citra perusahaan kepada pihak eksternal yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang rendah, memberikan informasi yang relevan dalam memprediksi laba masa depan, meningkatkan kepuasan hubungan bisnis, meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kapabilitas manajemen, dan meningkatkan kompensasi untuk manajemen” (Foster, 1986 dalam Budhi *et al.*, 2018).

“Kelebihan dari *Indeks Eckel* menurut Ashari (1994) dalam Nugraheni dan Sulistyawati (2018), yaitu:

1. Objektif dan berdasarkan pada statistik dengan pemisahan yang jelas antara perusahaan yang melakukan perataan penghasilan dan dengan perusahaan yang tidak melakukan perataan penghasilan.
2. Mengukur terjadinya perataan penghasilan tanpa harus membuat prediksi pendapatan, model ekspektasi penghasilan, pengujian biaya atau pertimbangan subjektif lainnya.
3. Mengukur perataan penghasilan dengan menjumlahkan pengaruh beberapa variabel perata penghasilan yang potensial dan menyelidiki pola perilaku perataan penghasilan selama periode waktu tertentu”.

Menurut Eckel (1981) dalam Suhartono dan Hendraswari (2020), *Indeks Eckel* dihitung sebagai berikut:

$$\text{Indeks Eckel} = \frac{CV \Delta I}{CV \Delta S} \quad (2.1)$$

Keterangan:

$CV$  : Koefisien variasi

$\Delta I$  : Perubahan laba bersih dalam satu periode

$\Delta S$  : Perubahan penjualan bersih dalam satu periode

$CV \Delta I$  dan  $CV \Delta S$  dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$CV \Delta I \text{ dan } CV \Delta S = \sqrt{\frac{\sum(\Delta x_i - \Delta \bar{x})^2}{n-1}} : \Delta \bar{x} \quad (2.2)$$

Keterangan:

$CV \Delta I$  : Koefisien variasi untuk perubahan laba bersih

$CV \Delta S$  : Koefisien variasi untuk perubahan penjualan bersih

$\Delta x_i$  : Perubahan laba bersih ( $I$ ) atau penjualan bersih ( $S$ ) antara tahun yang diamati dengan tahun sebelumnya

$\Delta \bar{x}$  : Rata-rata perubahan laba bersih ( $I$ ) atau penjualan bersih ( $S$ ) antara tahun yang diamati dengan tahun sebelumnya

$n$  : Banyaknya tahun yang diteliti

“Apabila  $CV \Delta I \geq CV \Delta S$  maka perusahaan tidak digolongkan sebagai perusahaan yang melakukan tindakan praktik perataan laba (Setyani dan Wibowo, 2019). “Koefisien variasi atau *variation coefficient* adalah nilai perbandingan antara deviasi standar dengan nilai rata-rata hitung dari perbandingan antara deviasi standar dengan nilai rata-rata dari suatu distribusi. Semakin besar nilai koefisien variasi berarti datanya kurang merata (heterogen), jika semakin kecil koefisien variasi berarti data merata (homogen)” (Yusniyanti dan Kurniati, 2017).

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A



“Laba didefinisikan sebagai hasil proses pendapatan dikurangi beban. Pendefinisian ini merupakan definisi secara struktural karena laba tidak dapat dipisahkan dari pengertian pendapatan dan biaya” (Suwardjono, 2014 dalam Annisa dan Kurniasih, 2017). Menurut Subramanyam (2017), “terdapat 2 komponen utama dalam laba, yaitu:

a. Pendapatan dan keuntungan (*revenues and gains*)

Pendapatan (*revenue*) merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang diperoleh, yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan yang berlangsung. Pendapatan ini meliputi arus kas masuk seperti penjualan tunai, dan arus kas masuk prospektif seperti penjualan kredit. Keuntungan (*gains*) adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang diperoleh, yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan yang berlangsung.

b. Beban dan kerugian (*expenses and loss*)

Beban (*expense*) merupakan arus kas keluar yang terjadi, arus kas keluar prospektif, atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang berlangsung. Kerugian (*loss*) adalah penurunan aset neto perusahaan yang timbul dari operasi yang tak terduga dan mendadak di suatu perusahaan”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*net sales* diperoleh dari pengurangan antara jumlah penjualan dengan retur penjualan dan diskon penjualan. Menurut IAI (2018) dalam PSAK 23, “pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:

1. Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
4. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.

5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal”.

## 2.5 Profitabilitas

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “rasio profitabilitas mengukur laba suatu perusahaan dalam periode waktu yang diberikan”. Menurut Hery (2015) dalam Nugraha dan Dillak (2018), “rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019) “profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio, yaitu:

- a. *Net Profit Margin*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh masing-masing unit mata uang penjualan, ditentukan dengan cara membagi *net income* dan *net sales*.
- b. *Asset Turnover*, yaitu rasio digunakan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan aset oleh perusahaan untuk kegiatan penjualan, ditentukan dengan cara membagi *net sales* dengan *average asset*.
- c. *Return on Asset*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur keseluruhan dari profitabilitas, ditentukan dengan cara membagi *net income* dengan *average asset*.
- d. *Return on Ordinary Shareholder's Equity*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa, rasio ini menunjukkan laba bersih perusahaan yang dihasilkan dari setiap mata uang yang diinvestasikan oleh *owners*. Rasio ini diukur dengan cara membagi *net income* dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa.
- e. *Earning per Share*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur laba yang dihasilkan pada setiap saham biasa. Rasio ini diukur dengan cara membagi *net income* dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.
- f. *Price Earnings Ratio*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur rasio harga pasar per lembar saham terhadap *earnings per share*. Rasio ini diukur dengan cara membagi harga pasar per lembar saham dengan *earnings per share*.

g. *Payout Ratio*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur persentase dari laba yang didistribusikan dari *cash dividend*. Rasio ini diukur dengan cara membagi *cash dividend* dengan *net income*".

"Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Kebijakan yang diambil perusahaan dalam menentukan laba dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya" (Sanjaya dan Rizky, 2018).

"Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Net Profit Margin (NPM)*. Menurut Weygandt *et al.* (2019), *Net Profit Margin (NPM) is measure of the percentage of each euro of sales that results in net income*, yang berarti bahwa *NPM* merupakan perhitungan persentase dari setiap Rupiah penjualan yang ada pada *net income*. *NPM* adalah perbandingan laba bersih dan penjualan. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi" (Desiyanti dan Desaputra, 2018 dalam Suhartono dan Hendraswari, 2020).

"Semakin besar rasio *NPM*, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi" (Kuswanto *et al.*, 2017). "Semakin besar *Net Profit Margin (NPM)* berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. Jadi semakin tinggi laba bersih yang diperoleh perusahaan" (Rosalie *et al.*, 2019). "Perencanaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan misalnya dengan penambahan segmen pelanggan baru, meningkatkan investasi dalam pembuatan produk dan bisnis baru untuk memperoleh lebih banyak pelanggan ataupun bisa melakukan penjualan saham sehingga perusahaan memperoleh dana untuk operasional dalam upaya meningkatkan penjualan perusahaan" (Puspasari *et al.*, 2017).

“Salah satu hal penting yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai laba yang optimal yaitu dengan efisiensi biaya produksi. Penggunaan sumber daya yang efisien merupakan salah satu upaya memaksimalkan laba” (Juwita dan Satria, 2017). “Cara meningkatkan efisiensi biaya yaitu dapat dilakukan dengan melakukan sistem perencanaan yang lebih baik, pemanfaatan alat-alat produksi dan berbagai *input* yang tersedia secara lebih efisien, dan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam berbagai bidang produksi secara tepat untuk mencapai efisiensi biaya” (Pristianingrum, 2017).

“Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dengan penerapan sistem *Just In Time (JIT)*. *Just In Time* dikenal sebagai filosofi yang fokus pada usaha-usaha untuk menghilangkan pemborosan yang berupa aktivitas yang tidak bernilai tambah (*non value-added activity*) dan meningkatkan aktivitas yang bernilai tambah (*value-added activity*). Tujuan penerapan *Just In Time* adalah meningkatkan produktivitas dengan mengurangi berbagai aktivitas yang tidak memberi nilai tambah bagi produk” (Pristianingrum, 2017). Menurut Anismadiyah dan Musawwamah (2021), “nilai *Net Profit Margin* yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan semakin baik, artinya perusahaan semakin efisien dalam mengeluarkan biaya, penjualan semakin meningkat, hal ini otomatis akan membuat pendapatan perusahaan semakin besar karena keuntungan bersih perusahaan meningkat”.

“Sebaliknya, semakin rendah *NPM* berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih” (Ismawati, 2021). “Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi dapat membagikan dividen yang akan diterima pemegang saham, bahkan dapat sebanding dengan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Pembagian dividen yang besar akan meningkatkan reputasi baik perusahaan dan potensi baik di masa depan” (Remelko dan Setiawan, 2021). “Laba yang tinggi dihasilkan dari pencapaian laba yang optimal. Laba sebuah perusahaan sangatlah penting karena laba dapat memberikan respon pasar yang kuat dalam menanggapi informasi laba yang tersedia sehingga menarik para investor untuk menanamkan sahamnya” (Kusuma, 2017).

*NPM* dihitung dengan rumus (Weygandt *et al.*, 2019):

$$NPM = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Sales}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

*NPM* : *Net Profit Margin*

*Net Income* : Laba tahun berjalan

*Net Sales* : Jumlah penjualan bersih yang dihasilkan perusahaan

“Laba bersih merepresentasikan inti dari pengukuran laba yang muncul dari transaksi dalam periode berjalan. *Unrealized (holding) gains and losses* yang muncul akibat perubahan nilai aset dan liabilitas yang direfleksikan pada *statement of financial position* seperti penambahan nilai pada *nonspeculative investment securities* yang dimiliki perusahaan (tetapi belum dijual), tidak termasuk kedalam *net income*” (Subramanyam, 2017). Sedangkan menurut Kieso *et al.* (2018), “*net income* merupakan penghasilan yang diperoleh setelah seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban sehingga laba bersih merupakan gambaran dari kesuksesan dan kegagalan suatu perusahaan dalam suatu periode”.

Menurut Hapsari dan Saputra (2018), “penjualan bersih (*net sales*) adalah seluruh hasil penjualan baik tunai maupun kredit, dikurangi dengan diskon penjualan dan retur penjualan”. “Penjual dapat menawarkan diskon tunai kepada pelanggan yang disebut oleh penjual sebagai diskon penjualan untuk pembayaran segera atas saldo yang jatuh tempo. Diskon penjualan adalah akun kontra dari pendapatan penjualan” (Weygandt *et al.*, 2019). “Retur penjualan (*sales return*) adalah transaksi dimana penjual menerima barang kembali dari pembeli (pengembalian). Retur penjualan adalah akun kontra dari pendapatan penjualan. Hal tersebut berarti bahwa akun retur penjualan akan menjadi pengurang dari akun pendapatan penjualan pada laporan laba rugi. Saldo normal retur penjualan adalah debit” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Pendapatan adalah peningkatan bruto ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas bisnis yang dilakukan untuk tujuan memperoleh pendapatan. Umumnya, pendapatan dihasilkan dari menjual barang dagangan, melakukan jasa, menyewa



properti, dan meminjamkan uang. Pendapatan biasanya menghasilkan peningkatan aset. Mereka mungkin muncul dari sumber yang berbeda dan disebut berbagai nama tergantung pada sifat bisnisnya” (Weygandt *et al.*, 2019). Menurut Subramanyam (2017), “pendapatan (*revenue*) dalam praktiknya didefinisikan sebagai arus kas masuk atau peningkatan aset lainnya dari entitas atau penyelesaian liabilitasnya akibat dari transaksi operasi utama atau pusat yang masih berlangsung”.

## **2.6 Pengaruh Profitabilitas terhadap Perataan Laba**

“Suatu perusahaan yang mempunyai *net profit margin* yang tinggi maka manajemen cenderung akan melakukan praktik perataan laba, karena manajemen mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dimasa depan” (Suhartono dan Hendraswari, 2020). “*Net profit margin* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu tingkat penjualan. Semakin tinggi rasio *net profit margin* memperlihatkan semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan mendapatkan laba. Manajer dalam meyakinkan investor cenderung memberikan informasi yang terperinci mengenai profitabilitas perusahaan” (Adriani *et al.*, 2018). “Hal ini berarti bahwa rasio *net profit margin* ini mengukur seluruh efisiensi baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Pada intinya rasio ini mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan, sehingga dapat memberikan gambaran tentang laba untuk para pemegang saham sebagai persentase dari penjualan. Margin penghasilan bersih ini diduga berpengaruh terhadap perataan laba, karena secara logis margin ini terkait langsung dengan objek perataan laba” (Kuswanto *et al.*, 2017). “*Net profit margin* mempunyai pengaruh terhadap perataan laba karena jika *net profit margin* tinggi maka perusahaan akan mempunyai nilai tambah bagi para investor. Hal yang sama juga ditunjukkan terhadap para calon investor potensial, dimana diharapkan mereka akan tertarik membeli saham perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan cenderung melakukan perataan laba agar *net profit margin*-nya selalu tinggi” (Framita, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Djoko BS dan Tahu (2017) serta Sudarmadi *et al.* (2017), menyatakan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan



*Net Profit Margin (NPM)* memiliki pengaruh positif terhadap perataan laba. Framita (2018) menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Net Profit Margin (NPM)* memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Susmitha dan Zulaikha (2021) menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Net Profit Margin (NPM)* tidak memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif terkait profitabilitas terhadap perataan laba adalah:

**Ha: Profitabilitas yang diproksikan dengan *Net Profit Margin (NPM)* berpengaruh negatif terhadap perataan laba.**

## **2.7 Ukuran Perusahaan**

Menurut Riyanto (2008) dalam Nugraha dan Dillak (2018), “ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aset”. “Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan” (Atarwaman, 2011 dalam Lahaya, 2017). “Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, jumlah karyawan, *log size*, total aset, dan total modal. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*)” (Lahaya, 2017). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 “terdapat kriteria ukuran perusahaan dilihat dari total aset atau kekayaan bersih yang dimiliki, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)”.

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 pasal 1 ayat 2, ukuran perusahaan terdiri dari:

1. “Emiten dengan aset skala kecil yang selanjutnya disebut emiten skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran dan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah, atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.
2. “Emiten dengan aset skala menengah yang selanjutnya disebut emiten skala menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran dan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah, atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.

3. “Emiten skala besar adalah emiten yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.

“Total aset perusahaan yang semakin besar dapat menggambarkan bahwa perusahaan tersebut sudah mencapai tahap kedewasaannya. Perusahaan yang telah berada pada tahap kedewasaannya maka perusahaan telah memiliki arus kas yang positif serta diperkirakan akan mempunyai aspek menguntungkan dalam kurun waktu jangka panjang” (Suwardika dan Mustanda, 2017). “Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan sehingga semakin besar sumber daya yang dapat digunakan untuk kegiatan operasinya. Dengan semakin besar sumber daya yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi, produksi perusahaan akan semakin meningkat sehingga akan memperoleh pendapatan yang tinggi dan mengeluarkan beban sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional (efisien)” (Kurniawan dan Suryaningsih, 2018).

Sebaliknya menurut Hung *et al.* (2021), “ukuran perusahaan yang kecil akan membatasi akses permodalan, kemampuan untuk menerapkan teknologi inovatif, dan kapasitas untuk menciptakan pekerjaan yang berkualitas”. “Tetapi, perusahaan yang berukuran kecil memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola mesin, inovasi produk, dan pendekatan pasar” (Hung *et al.*, 2021). “Perusahaan dengan ukuran perusahaan kecil juga tidak menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan dengan ukuran perusahaan besar seperti inefisiensi karena beberapa kendala seperti biaya tenaga kerja, biaya terkait yang lebih besar, manajemen yang kompleks, manajemen birokrasi, dan administrasi yang rumit” (Jonsson, 2007 dalam Hung *et al.*, 2021).

“Dalam menghitung ukuran perusahaan pada penelitian ini, dapat menggunakan rumus logaritma natural total aset” (Jogiyanto, 2007 dalam Nugraha dan Dillak, 2018):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} \times \text{Total Aset} \quad (2.4)$$

“Aset adalah sumber daya yang dimiliki bisnis. Bisnis menggunakan asetnya untuk melakukan aktivitas seperti produksi dan penjualan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh semua aset adalah kemampuan untuk memberikan layanan atau manfaat di masa depan” (Weygandt *et al.*, 2019).

Menurut Kieso *et al.* (2018), “aset dibedakan menjadi aset tidak lancar dan aset lancar. Aset tidak lancar adalah aset jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak bisa dengan mudah atau secara cepat dikonversi menjadi uang tunai dengan nilai yang sama, aset tidak lancar terdiri dari 4, yaitu:

1. *Intangible asset*

Aset dengan umur yang panjang yang tidak memiliki substansi fisik namun sangat berharga.

2. *Property, plant, and equipment*

Aset yang umur kegunaannya relatif panjang, biasanya perusahaan sering menggunakannya untuk operasi bisnis, sering juga disebut *fixed asset*.

3. *Long term investment*

Umumnya adalah bentuk investasi saham biasa dan obligasi dari perusahaan lain yang normalnya dimiliki dalam waktu beberapa tahun serta *non-current asset* seperti tanah atau bangunan yang tidak digunakan perusahaan dalam aktivitas operasi.

4. *Other assets*

Komponen yang termasuk *other assets* sangat bervariasi dalam praktiknya. Seperti *long-term prepaid expenses* dan *non-current receivables*. Komponen lain yang mungkin termasuk adalah *assets in special funds*, *property held for sale*, dan *restricted cash or securities*.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “aset lancar adalah aset yang diharapkan perusahaan dapat dikonversikan ke kas atau digunakan dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasi normal, aset lancar terdiri dari 5, yaitu:

1. *Inventories*

Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan atau dijual dalam periode tertentu. Penyajian persediaan dilakukan dengan cara *lower of cost or net realizable value* dan asumsi arus biaya yang digunakan misalnya FIFO atau biaya rata-rata).

2. *Prepaid expenses*

Beban dibayar dimuka digolongkan dalam aset lancar jika akan menerima manfaat (biasanya jasa) dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi.

### 3. *Receivables*

Piutang merupakan jumlah uang yang harus dibayar dari individu atau perusahaan. Piutang juga merupakan klain yang diharapkan dapat ditagih secara tunai. Pengelolaan piutang merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap perusahaan yang menjual barang atau jasa secara kredit. Perusahaan harus dengan jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi karena tidak tertagihnya, jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama dari piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait.

### 4. *Short-term investments*

Perusahaan perlu melaporkan sekuritas perdagangan (investasi dapat berupa utang ataupun ekuitas) sebagai aset lancar. Perusahaan harus melaporkan sekuritas yang dimiliki untuk ditagih (sering disebut sebagai sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo) dan dinilai dengan biaya yang telah diamortisasi.

### 5. *Cash and cash equivalents*

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang”.

“Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
- b. biaya perolehannya dapat diukur secara andal” (IAI, 2018 dalam PSAK 16).

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 16, “biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi”.

## **2.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Perataan Laba**

“Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang bisa diukur salah satunya dengan melihat total aset yang dimiliki. Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung melakukan praktik perataan laba, karena perusahaan besar,

banyak diteliti dan dipandang dengan kritis oleh investor. Sehingga perusahaan besar selalu ingin menunjukkan kinerja yang baik dengan memperlihatkan laba yang stabil, karena investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dengan ukuran yang besar, cenderung melakukan praktik perataan laba” (Nugraha dan Dillak, 2018). “Di samping itu, ukuran perusahaan dapat memengaruhi tindakan manajer di dalam melakukan perataan laba. Semakin besarnya ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan lengkap mengenai perusahaannya, demikian sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan, maka informasi yang disampaikan tidak begitu transparan. Perusahaan yang ukurannya lebih besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba” (Iskandar dan Suardana, 2016 dalam Maotama dan Astika, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lahaya (2017), Benandri dan Andayani (2018) serta Maotama dan Astika (2020) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset berpengaruh positif terhadap perataan laba. Oktaviasari *et al.* (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset berpengaruh terhadap perataan laba. Sedangkan Setyani dan Wibowo (2019) serta Yunengsih *et al.* (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba adalah:

**Ha<sub>2</sub>: Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset berpengaruh negatif terhadap perataan laba.**

## **2.9 Leverage**

“*Leverage* adalah analisis untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disuplai oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan atau untuk mengukur sampai berapa jauh perusahaan telah dibiayai dengan utang-utang jangka panjang” (Oktaviasari *et al.*, 2018). Menurut



Weygandt *et al.* (2019), “*leverage* memungkinkan perusahaan untuk menggunakan uang yang disediakan oleh bukan pemilik untuk meningkatkan laba kepada pemilik”. Terdapat 4 jenis *leverage ratio*, diantaranya adalah *debt to total assets ratio* yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membeli aset menggunakan utang, *debt to equity ratio* yaitu rasio proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang ditunjukkan untuk membiayai operasional atau aset perusahaan, *debt to capital ratio* adalah rasio utang yang berfokus pada utang sebagai komponen basis atas total perusahaan, dan *debt to EBITDA ratio* yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan membandingkan nilai kewajiban utang dengan profitabilitasnya” (Erica, 2018).

Menurut Fahmi (2014) dalam Nugraha dan Dillak (2018), “rasio *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang, dihitung dengan rasio *Debt to Total Asset (DTA)*”. “Rasio utang terhadap aset mengukur persentase dari total aset yang diberikan kreditur. Perhitungannya adalah dengan membagi total kewajiban (kewajiban lancar dan tidak lancar) dengan total aset” (Weygandt *et al.*, 2019). Menurut Zulkarnaen (2018), “semakin tinggi *DTA* berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aset guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan”. “*DTA* dapat menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dalam membiayai aset perusahaan. Semakin besar rasio ini artinya perusahaan dalam membiayai asetnya lebih banyak menggunakan utang dibandingkan dengan modal sendiri” (Zulvia, 2019). Menurut Kasmir (2014) dalam Deli (2020), “semakin tinggi nilai *DTA* berarti semakin besar sumber dana melalui pinjaman untuk membiayai aset”. Menurut Brigham dan Houston (2019), “terdapat *trade-off* dari keuntungan pajak yang didapatkan dari kebijakan pendanaan utang terhadap permasalahan yang disebabkan oleh potensi kebangkrutan”. “*Trade-off theory* menjelaskan mengenai keseimbangan antara manfaat yang akan diperoleh akibat dari penggunaan utang, dimana ketika perusahaan dalam kegiatan operasinya menggunakan utang namun manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang jauh lebih besar dari jumlah utang maka penggunaan utang diperbolehkan” (Anugerah dan Suryanawa, 2019). “*Trade-off theory* menjelaskan bahwa perusahaan yang sebagian besar asetnya berasal dari aset

tetap, maka akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan utang, karena aset tetap seperti tanah dan bangunan, dapat dijadikan jaminan untuk menutupi utang-utangnya” (Jombrik, 2020). “Nilai *DTA* yang tinggi menunjukkan risiko yang tinggi pula karena ada kekhawatiran perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aset yang dimiliki sehingga untuk memperoleh tambahan pinjaman akan semakin sulit” (Kasmir, 2014 dalam Deli, 2020).

“Keuntungan penggunaan utang sebagai sumber pendanaan aset adalah pembayaran bunga (*interest*) bersifat mengurangi pajak (*tax-deductible*), kewajiban keuangan utang dengan jelas ditentukan dan bersifat tetap kecuali obligasi dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate interest*), dalam keadaan ekonomi inflasi maka utang dapat dibayar dengan nilai uang yang lebih rendah karena utang jangka panjang dibayar ketika nilai uang telah menurun akibat inflasi, dan penggunaan utang yang bijaksana dapat mengurangi biaya modal perusahaan sejauh utang tidak menambah posisi risiko perusahaan. Sedangkan, kerugian dari penggunaan utang sebagai sumber pendanaan aset adalah bunga dan nominal pokok (*principal amount*) ditentukan pada kontrak dan harus dipenuhi perusahaan dalam keadaan apapun, perjanjian utang dapat mengakibatkan pembatasan yang memberatkan perusahaan seperti mempertahankan modal kerja pada tingkat tertentu serta adanya batas penerbitan utang di masa depan, dan penggunaan utang yang melebihi titik yaitu *cost of financial distress* lebih besar daripada *interest tax shield* dapat mengurangi nilai dari saham biasa perusahaan” (Hirt *et al.*, 2011 dalam Setiawati dan Raymond, 2017).

“Sebaliknya, *DTA* yang rendah menunjukkan total utang semakin kecil dibandingkan dengan total aset sendiri sehingga semakin besar pendapatan perusahaan untuk melunasi utang-utangnya terhadap pihak luar perusahaan dan menunjukkan bahwa dari total aset yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan” (Thoyib *et al.*, 2018). “Pada umumnya, perusahaan dengan pendapatan yang relatif stabil memiliki nilai *DTA* yang lebih tinggi seperti perusahaan utilitas publik, bila dibandingkan dengan perusahaan dengan siklus musiman yang pendapatannya fluktuatif seperti perusahaan *high-tech*” (Weygandt *et al.*, 2019).

Weygandt *et al.*, (2019) merumuskan *DTA* dengan:

$$DTA = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}} \quad (2.5)$$

Keterangan:

*DTA* : *Debt to Total Asset*

*Total liabilities* : Jumlah liabilitas yang dimiliki perusahaan

*Total asset* : Jumlah aset yang dimiliki perusahaan

Menurut Munawir (2014) dalam Indrawan dan Agustien (2019), “utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, karena utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur”. Sedangkan, menurut Hery (2011) dalam Indrawan dan Agustien (2019), “utang (*liabilities*) merupakan kewajiban perusahaan kepada kreditur (*supplier*, bankir) dan pihak lainnya (karyawan, pemerintah), kreditur dan pihak lainnya disini memiliki hak/klaim atas aset perusahaan”. Weygandt *et al.* (2019) “membedakan liabilitas menjadi 2 macam yaitu *Non-Current Liabilities* dan *Current Liabilities*”. “*Non-Current Liabilities* adalah kewajiban yang diharapkan perusahaan untuk dibayar setelah satu tahun. Kewajiban dalam kategori ini termasuk utang obligasi, utang hipotek, utang wesel bayar jangka panjang, utang sewa, dan utang pensiun. Sedangkan, *Current Liabilities* adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam tahun yang akan datang atau siklus operasinya, mana yang lebih lama. Contoh umum adalah utang dagang, utang gaji dan upah, utang wesel bayar, utang bunga, dan pendapatan pajak harus dibayar” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Aset diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang ada di perusahaan. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu” (Suwardjono, 2016 dalam Suwardani *et al.*, 2018). “Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, setiap bentuk badan usaha yang ada saat ini mulai dari yang berukuran kecil hingga yang besar pasti akan memanfaatkan aset miliknya. Contoh dari aset operasi yang dimiliki perusahaan adalah aset tetap dan aset tidak

berwujud, yang merupakan aset operasi tidak lancar (jangka panjang)” (Hery dan Widyawati, 2015 dalam Suwardani *et al.*, 2018).

## 2.10 Pengaruh *Leverage* terhadap Perataan Laba

“Semakin tinggi persentase *debt to total asset* sebuah perusahaan, semakin besar juga risiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo” (Weygandt *et al.*, 2019). “Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar pendanaan aset perusahaan melalui utang. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, artinya memiliki risiko yang tinggi pula, karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utangnya dengan aset yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi, cenderung melakukan praktik perataan laba, karena ingin menstabilkan kondisi keuangan dengan utang yang besar, namun dengan laba yang besar juga” (Nugraha dan Dillak, 2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Putri *et al.* (2016) dalam Nugraha dan Dillak (2018) yang menyatakan bahwa “perusahaan dengan *leverage* tinggi diduga melakukan perataan laba karena terancam *default* sehingga manajemen membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviasari *et al.* (2018) menyatakan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Total Asset (DTA)* berpengaruh terhadap perataan laba. Djoko BS dan Tahu (2017) menyatakan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *DTA* berpengaruh negatif terhadap perataan laba. Sedangkan Nugraha dan Dillak (2018) serta Setyani dan Wibowo (2019) menyatakan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *DTA* tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif terkait *leverage* terhadap perataan laba adalah:

**Ha:** *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Total Asset (DTA)* berpengaruh negatif terhadap perataan laba.

## 2.11 Nilai Perusahaan

“Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dapat

dicermin dalam harga saham perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan” (Lahaya, 2017). Sedangkan menurut Saifi dan Hidayat (2017) dalam Rahmawati (2021), “nilai perusahaan merupakan persepsi pemegang saham terhadap pencapaian keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki yang tercermin dalam harga saham perusahaan tersebut”. Menurut Ross *et al.* (2019), “terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan melalui harga saham yaitu:

1. *Price-Earnings Ratio (PER)*

“Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak investor bersedia untuk membayar setiap satuan laba perusahaan saat ini”.

2. *Price-Sales Ratio*

“Rasio ini digunakan apabila perusahaan mengalami laba negatif dalam periode yang panjang sehingga *PER* tidak terlalu berarti”.

3. *Market-to-Book Ratio*

“Rasio ini digunakan untuk membandingkan nilai pasar dari investasi perusahaan terhadap biayanya”.

4. *Tobin's Q*

“Rasio ini digunakan untuk membandingkan nilai pasar dari sebuah aset dibandingkan dengan biaya penggantinya”.

5. *Enterprise Value – EBITDA Ratio*

“Rasio ini digunakan untuk mengukur nilai perusahaan dengan estimasi dari aset operasi milik perusahaan. Aset operasi milik perusahaan yang dimaksud adalah seluruh aset perusahaan kecuali kas. Tentu saja, menjadi tidak praktik untuk mencari nilai pasar dari setiap aset individu perusahaan karena nilai pasar biasanya tidak akan selalu tersedia bagi seluruhnya tersedia. Sebaliknya, kita dapat menggunakan sisi kanan persamaan akuntansi, liabilitas dan ekuitas, dan menghitung nilai perusahaan”.

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diprosikan menggunakan rasio *price to book value (PBV)*. Menurut Brigham dan Houston (2011) dalam Yanti dan Darmayanti (2019), “*Price to Book Value (PBV)* merupakan rasio keuangan yang



membandingkan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham, apabila nilai *PBV* yang semakin tinggi maka semakin besar pula tingkat kemakmuran dari pemegang saham, sehingga perusahaan dikatakan telah mencapai salah satu tujuannya”.

“Nilai *PBV* akan tinggi apabila kinerja perusahaan baik. Hal ini berarti semakin baik kinerja perusahaan, maka rasio *PBV* akan semakin meningkat dari tahun ke tahun” (Cahyaningrum dan Antikasari, 2017). Menurut Sorongan dan Yatna (2018), “semakin tinggi nilai *Price to Book Value Ratio (PBV)* suatu perusahaan berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut di masa yang akan datang”. “Salah satu komponen untuk melakukan perhitungan *Price to Book Value* adalah *book value*. *Book value* adalah modal sendiri yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nilai *book value* ini juga bisa didapat dari perhitungan aset dikurangi dengan utang dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Nilai *PBV* ini digunakan untuk menilai apakah harga dari saham yang ditawarkan perusahaan adalah harga saham yang mahal atau murah. Apabila nilai *PBV* berada di atas nilai 1, maka harga saham mahal, begitupun sebaliknya. Para investor tentu memiliki keinginan untuk membeli saham dengan harga yang murah atau yang memiliki nilai *PBV* kurang dari 1. Tetapi perlu diingat, bahwa harga saham yang murah bukanlah jaminan akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemegang saham. Bisa saja nilai tersebut rendah karena perusahaan tersebut memiliki banyak utang. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai atau harga saham yang mahal juga belum tentu dapat mendatangkan keuntungan yang rendah. Perusahaan besar serta perusahaan yang bergerak di bidang keuangan tentunya memiliki nilai *PBV* yang lebih tinggi” (Ramadhani, 2020). “Harga yang terlalu rendah sering diartikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Namun bila harga saham terlalu tinggi akan mengurangi kemampuan investor untuk membeli sehingga menimbulkan harga saham sulit untuk meningkat lagi” (Kanisawati, 2018).

“Nilai buku merupakan angka akuntansi yang mencerminkan biaya historis. Oleh karena itu, *PBV* membandingkan nilai pasar dari investasi perusahaan terhadap biayanya. Nilai yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan belum sukses secara keseluruhan dalam menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya”



(Ross *et al.*, 2019). “Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas 1 yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio *PBV* semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan” (Husnan, 2003 dalam Nugraha dan Sulasmiyati, 2017).

“Penilaian dengan *PBV* tidak didasarkan pada perbandingan dengan nilai intrinsik saham, tetapi dihitung dengan menetapkan nilai *PBV* apakah diatas atau dibawah 1, yang berarti jika nilai *PBV* diatas 1 menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya (*overvalued*), sebaliknya jika *PBV* dibawah 1 berarti nilai pasar saham lebih kecil dari nilai bukunya (*undervalued*)” (Husnan, 2003 dalam Nugraha dan Sulasmiyati, 2017).

Menurut Sucipto dan Sudyatno (2018), “keberadaan rasio *PBV* sangat penting bagi para investor maupun calon investor untuk menetapkan keputusan investasi”. “Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga saham yang *overvalued* atau *undervalued*. Semakin rendah *PBV* suatu saham, maka saham tersebut dikategorikan *undervalued*, yang sangat baik untuk investasi jangka panjang” (Markonah *et al.*, 2020). Menurut Halim (2018) dalam Natalia *et al.* (2019), “pedoman yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi adalah jika nilai saham perusahaan yang dinilai *undervalued* sebaiknya keputusan yang diambil adalah membeli dan bagi yang sudah memiliki adalah menahan saham dikarenakan saham dihargai murah oleh pasar”. “Investor biasanya lebih suka membeli saham pada saat *undervalued*, tetapi tidak semua saham yang *undervalued* akan selalu terus bernilai murah karena saham yang dibeli dengan harga murah dapat mengalami kenaikan di masa yang akan datang. Saat terjadi *overvalued* maka harga saham akan mahal dan apabila investor menjual saham yang awalnya dibeli dengan harga murah, maka investor akan mendapatkan keuntungan” (Afriani dan Asma, 2019). Menurut Kennedy dan Yanis (2019), “keputusan investasi yang dilakukan untuk saham yang berjenis *undervalued* yaitu membeli saham tersebut, karena memiliki taraf keuntungan saham individu lebih tinggi dari taraf keuntungan rata-rata yang diharapkan”. “Namun, nilai *PBV* yang rendah juga dapat mengindikasikan penurunan kualitas dan kinerja *fundamental* emiten. Oleh karena

itu, nilai *PBV* juga harus dibandingkan dengan saham *PBV* emiten lain dalam industri yang sama. Jika terlalu banyak perbedaan maka perlu dilakukan analisis” (Markonah *et al.*, 2020).

Menurut Subramanyam (2017), rumus dari *Price to Book Value (PBV)* adalah:

$$PBV = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Book Value per Share}} \quad (2.6)$$

Keterangan:

*PBV* : *Price to Book Value*

*Market Price per Share* : *Closing price* harian per saham perusahaan pada periode tahun n

*Book Value per Share* : Nilai buku per lembar saham

*Market Price per Share* yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan saham (*closing price*). “Harga penutupan (*closing price*) adalah harga yang terbentuk berdasarkan penjumlahan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh anggota Bursa Efek yang tercatat pada akhir jam perdagangan di pasar reguler. Pasar reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek melalui *Jakarta Automated Trading System (JATS)* dan penyelesaiannya dilakukan pada hari Bursa ke-3 setelah terjadinya transaksi Bursa (T+3). Perdagangan pasar reguler dilakukan pada hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional) yang terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 09.00 sampai 11.30, sesi kedua berlangsung pukul 13.30 sampai 14.49” (BEI, 2021).

“*Book Value Per Share (BVPS)* mewakili ekuitas yang dimiliki pemegang saham biasa dalam aset bersih perusahaan dengan memiliki satu saham. Nilai buku per lembar saham adalah jumlah yang akan diterima setiap saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan” (Weygandt *et al.*, 2019).

*Book Value per Share* dapat dihitung dengan cara (Weygandt *et al.*, 2019):

$$\text{Book Value Per Share} = \frac{\text{Total Equity}}{\text{Outstanding Ordinary Shares}} \quad (2.7)$$

Keterangan:

*Total Equity* : Total Ekuitas

*Outstanding Ordinary Shares*: Jumlah lembar saham biasa yang beredar

“Jika suatu perusahaan memiliki saham preferen, maka langkah perhitungan *BVPS* adalah” (Weygandt *et al.*, 2019):

1. Menghitung ekuitas atas pemegang saham preferen. Ekuitas ini sama dengan *call price* dari saham preferen dan *dividend in arrears*. Jika saham preferen tidak memiliki *call price* maka nilai saham preferen dihitung dengan nilai par. *Dividend arrears* adalah dividen tertunggak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham *cumulative preference shares* apabila perusahaan tidak membayarkan dividen pada periode sebelumnya.
2. Menentukan ekuitas atas pemegang saham biasa dengan mengurangi ekuitas atas saham preferen dari total ekuitas.
3. Menentukan *BVPS* dengan membagi ekuitas atas pemegang saham dengan jumlah saham biasa yang beredar” (Weygandt, *et al.*, 2019).

Menurut IAI (2018) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, “ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas”. Menurut Kieso *et al.* (2018), ekuitas sering kali disebut sebagai ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Ekuitas dapat dikelompokkan dalam laporan perubahan ekuitas dalam kategori sebagai berikut (Kieso, *et al.*, 2018):

1. *Share capital: par* atau *stated value* dari saham yang diterbitkan. Termasuk didalamnya saham biasa dan saham preferen.
2. *Share premium*: kelebihan dari jumlah yang dibayarkan atas *par* atau *stated value*.
3. *Retained earnings*: penghasilan perusahaan yang tidak didistribusikan.
4. *Accumulated other comprehensive income*: jumlah agregat dari item pendapatan komprehensif lainnya.

5. *Treasury shares*: jumlah saham biasa yang dibeli kembali.
6. *Non-controlling interest (minority interest)*: bagian ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “jumlah saham biasa yang beredar adalah jumlah saham biasa yang diterbitkan dikurangi dengan jumlah saham yang diperoleh atau dibeli kembali (*treasury shares*)”. Sedangkan menurut Subramanyam (2017), “saham biasa adalah suatu kelas saham yang mewakili kepentingan kepemilikan dan menanggung risiko dan hasil akhir dari kinerja perusahaan”. Adapun menurut Kieso, *et al.* (2018), “jumlah saham beredar adalah saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang sekarang dimiliki oleh pemegang saham”.

### **2.12 Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Perataan Laba**

“Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Oleh sebab itu ada kemungkinan manajemen melakukan praktik perataan laba menjaga konsistensi atau kestabilan laba pada setiap periode maka, nilai perusahaan tetap terjaga” (Lahaya, 2017). Menurut Suranta dan Merdiastuti (2004) dalam Lahaya (2017), “perusahaan yang memiliki nilai pasar yang tinggi akan cenderung untuk melakukan perataan laba karena perusahaan akan cenderung menjaga konsistensi labanya agar nilai pasar perusahaan tetap tinggi sehingga dapat menarik lebih banyak investor”. “Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi akan cenderung melakukan praktik perataan laba. Hal ini dikarenakan suatu perusahaan dengan nilai yang tinggi memiliki tingkat kestabilan laba yang tinggi pula sehingga dapat lebih menarik investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut” (Arum *et al.*, 2017). Sedangkan menurut Benandri dan Andayani (2018), “perusahaan dengan nilai perusahaan yang tinggi akan cenderung untuk melakukan praktik perataan laba, karena dengan melakukan perataan laba, variabilitas laba dan risiko saham dari perusahaan akan semakin menurun”.

“Nilai perusahaan dapat memotivasi manajer untuk melakukan perataan laba. Tindakan perataan laba mempunyai hubungan timbal balik terhadap nilai

perusahaan, karena perataan laba menghasilkan berkurangnya fluktuasi laba sehingga dapat mencerminkan stabilitas kinerja perusahaan atau nilai perusahaan” (Saputri *et al.*, 2017). “Semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan melakukan perataan laba lebih besar, dikarenakan nilai perusahaan yang baik mencerminkan laba yang dihasilkan perusahaan tersebut stabil sehingga menarik minat manajemen untuk melakukan perataan laba. Nilai perusahaan yang baik juga mengartikan bahwa citra perusahaan dianggap baik bagi investor sehingga investor berkeinginan membeli saham tersebut” (Haniftian dan Dillak, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Megarani *et al.* (2019), Benandri dan Andayani (2018), Saputri *et al.* (2017), dan Arum *et al.* (2017) menyatakan bahwa nilai perusahaan yang diproksikan dengan *Price to Book Value (PBV)* berpengaruh terhadap perataan laba. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lahaya (2017) serta Haniftian dan Dillak (2020) menyatakan bahwa nilai perusahaan yang diproksikan dengan *PBV* tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif terkait nilai perusahaan terhadap perataan laba adalah:

**H<sub>a4</sub>: Nilai perusahaan yang diproksikan dengan *Price to Book Value (PBV)* berpengaruh negatif terhadap perataan laba.**

### **2.13 Cash Holding**

Menurut Doan (2020), “*cash holding* adalah proporsi antara kas dan setara kas perusahaan dengan total aset perusahaan”. “*Cash holding* merupakan kepemilikan tunai yang didefinisikan sebagai uang tunai yang termasuk ke dalam investasi jangka pendek, bersifat sangat likuid yang siap untuk dikonversi menjadi uang tunai dan memiliki risiko. Keuntungan yang diperoleh dari memegang aset likuid, seperti perusahaan bisa mengurangi biaya transaksi agar meningkatkan pendanaan dan tidak perlu melikuidkan aset untuk melakukan transaksi” (Carolline dan Santioso, 2020). Sedangkan menurut Gazali *et al.* (2019), “*cash holding* adalah jumlah kas maupun setara kas yang dimiliki oleh perusahaan, penting untuk manajemen terutama pihak manajer keuangan dalam mengelola tingkat kepemilikan kas di tahapan yang optimal (tidak kurang ataupun berlebih). “*Cash holding* sangat mudah



dikendalikan oleh manajer karena sifatnya yang likuid, jangka pendek serta mudah dicairkan dalam bentuk kas. Adanya kas di dalam perusahaan, membuat investor dapat menilai kinerja manajer dari kemampuannya dalam menjaga agar kenaikan kas yang ada di perusahaan tetap stabil.” (Putri dan Budiasih, 2018).

“*Cash holding* yang tinggi akan membuat investor dan kreditur akan menganggap perusahaan tidak memiliki perencanaan untuk investasi dan perlindungan saham lemah. Sebaliknya, *cash holding* yang rendah akan berakibat kurangnya dana yang akan digunakan untuk operasional perusahaan, investasi di masa depan dan macetnya pembayaran utang” (Gazali *et al.*, 2019). “Suatu perusahaan bisa saja memiliki sejumlah besar aset fisik atau piutang, tetapi apabila kehabisan uang tunai akan mengakibatkan kebangkrutan teknis atau hilangnya peluang pertumbuhan yang berharga. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menahan uang tunai untuk melindungi dari kekurangan kas sementara dalam melakukan pembayaran atau investasi. Kas dapat digunakan dengan segera untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan. *Cash holding* yang besar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas operasional sehari-hari seperti pembelian persediaan, pembayaran utang, pembiayaan kegiatan operasional perusahaan, dan lain sebagainya” (Ridha *et al.*, 2019).

Irwanto *et al.*, (2019) menyatakan: “Penentuan tingkat *cash holding* yang optimal sangat penting bagi suatu perusahaan dikarenakan *cash holding* yang terlalu tinggi akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk berinvestasi dan mendapatkan *return*, sedangkan *cash holding* yang terlalu rendah akan menyebabkan kegiatan operasional perusahaan terganggu dan kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Perusahaan perlu menjaga agar tingkat *cash holding* di perusahaan berada pada titik yang optimal. Banyak perusahaan yang berfokus pada persaingan dalam dunia bisnis sehingga mendorong setiap perusahaan untuk semakin meningkatkan dan memperluas bisnisnya di seluruh wilayah. Perluasan bisnis perusahaan yang terlalu agresif membuat para manajer perusahaan mengabaikan tingkat *cash holding* yang optimal, sehingga perusahaan tersebut mengalami krisis kas dalam memenuhi kegiatan operasional dan tidak dapat melunasi utang yang telah jatuh tempo. Hal ini disebabkan oleh kinerja manajer



perusahaan yang kurang baik dalam mengelola kas yang seharusnya tidak terlalu rendah”.

Dalam penelitian ini, “*cash holding* diukur dengan membandingkan antara jumlah kas dan setara kas dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan” (Nirmanggi dan Muslih, 2020). Oleh karena itu, *cash holding* diprosikan dengan rumus (Nirmanggi dan Muslih, 2020):

$$\text{Cash Holding} = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Total Aset}} \quad (2.8)$$

“Kas adalah aset yang paling likuid yang merupakan media standar pertukaran dan dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya. Perusahaan umumnya menggolongkan kas sebagai aset lancar. Kas terdiri dari koin, kas dalam bentuk mata uang lain, dan dana yang tersedia di deposito bank” (Kieso, *et al.*, 2018). “*Cash* terdiri dari koin, mata uang (uang kertas), cek, wesel, uang di perusahaan, uang di deposito, dan uang di bank atau tempat penyimpanan serupa. Saat disajikan dalam laporan posisi keuangan, kas di perusahaan, kas di bank, dan kas kecil sering kali digabungkan dan dilaporkan hanya sebagai *cash*” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Setara kas adalah investasi jangka pendek, sangat likuid yang siap dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang diketahui dan mendekati jatuh tempo sehingga menimbulkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan karena perubahan suku bunga. Contoh dari setara kas adalah *treasury bills*, *commercial paper*, dan *money market funds* yang dibeli dengan kas” (Kieso *et al.* 2018). Menurut Weygandt *et al.* (2019), “setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan memiliki ciri-ciri:

1. Mudah diubah menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui.
2. Mendekati masa jatuh tempo sehingga nilai pasar mereka relatif tidak sensitif terhadap perubahan tarif bunga”.

“Kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposits*). Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak

signifikan. Setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan” (IAI, 2018 dalam PSAK 2). “Kas merupakan aset yang paling likuid, mencakup mata uang yang tersedia dan dana pada deposito. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang mudah dikonversi menjadi kas dan jatuh tempo sangat pendek, sehingga memiliki risiko minimal terkait perubahan harga akibat pergerakan suku bunga. Investasi ini biasanya memiliki jatuh tempo 3 bulan atau lebih pendek. Contoh dari setara kas adalah surat utang negara (*treasury bills*) jangka pendek, *commercial paper*, dan reksadana pasar uang. Setara kas sering berfungsi sebagai repositori (penyimpanan) sementara atas kelebihan kas” (Subramanyam, 2017).

“Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Aset dibagi menjadi 2 yaitu *non-current assets* dan *current assets*. *Current assets* adalah kas dan aset lain yang perusahaan harapkan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. *Non-current assets* adalah aset yang tidak memenuhi definisi dari *current asset*. *Non-current assets* terdiri dari *long-term investments, property, plant, and equipment, intangible assets, dan other assets*. Sedangkan terdapat 5 pos utama yang ada pada *current assets* yaitu *inventories, prepaid expenses, receivables, short-term investments, dan cash and cash equivalents*” (Kieso *et al.*, 2018).

#### **2.14 Pengaruh *Cash Holding* terhadap Perataan Laba**

“Berdasarkan teori agensi, adanya konflik antara manajer dan pemegang saham menimbulkan keinginan manajemen untuk memegang kas (*cash holding*) di perusahaan dan menjaga kestabilan kenaikan kas yang ada di dalam perusahaan, karena kenaikan kas yang stabil di perusahaan membuat kinerja manajemen terlihat baik dimata pemegang saham. Kebijakan *cash holding* yang dikendalikan oleh

manajer inilah yang meningkatkan motivasi manajer untuk mementingkan kepentingan pribadi dengan cara melakukan manajemen laba dalam bentuk perataan laba” (Chen, 2008 dalam Eni dan Suaryana, 2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Mohammadi *et al.* (2012) dalam Eni dan Suaryana (2018) yang menyatakan bahwa “*cash holding* (kepemilikan kas) berhubungan langsung dengan *income smoothing*, yang berarti semakin tinggi kepemilikan kas atau semakin tinggi kas yang ada di perusahaan maka semakin tinggi praktik perataan laba”.

“Kebijakan *cash holding* yang dikendalikan oleh manajer meningkatkan motivasi manajer untuk mementingkan kepentingan pribadi dengan cara melakukan manajemen laba dalam bentuk perataan laba. Manajer termotivasi untuk melakukan tindakan oportunistik karena perusahaan memiliki *free cash flow* yang tinggi. Sifat *cash holding* yang sangat likuid membuat kas sangat mudah dicairkan dan mudah dipindahtangankan, sehingga mudah disembunyikan untuk tindakan tidak semestinya” (Haniftian dan Dillak, 2020). “Manajer perusahaan yang bertindak sebagai pengendali kebijakan *cash holding* dapat melakukan penggelapan dana untuk memperkaya dirinya dengan cara mempertahankan sejumlah kas di perusahaan. *Cash holding* memiliki sifat yang sangat likuid sehingga membuat kas sangat mudah untuk dicairkan ataupun dipindahtangankan. Sifat likuid yang dimiliki oleh *cash holding* ini dapat mendorong pihak manajer untuk melakukan praktik *income smoothing* karena tersedianya dana yang menjadi objek bagi pihak manajer untuk melakukan praktik *income smoothing*” (Adiwidjaja dan Tundjung, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirmanggi dan Muslih (2020), Adiwidjaja dan Tundjung (2019), Haniftian dan Dillak (2020), dan Gazali *et al.* (2019) menyatakan bahwa *cash holding* berpengaruh positif terhadap perataan laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eni dan Suaryana (2018), Caroline dan Santioso (2020) serta Suhartono dan Hendraswari (2020) menyatakan bahwa *cash holding* tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif terkait *cash holding* terhadap perataan laba adalah:

**Ha: Cash Holding berpengaruh negatif terhadap perataan laba.**

## **2.15 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Nilai Perusahaan dan *Cash Holding* secara simultan terhadap Perataan Laba**

Penelitian Nugraha dan Dillak (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA*, *leverage* yang diproksikan dengan *DAR*, dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset terhadap perataan laba secara simultan dan signifikan memengaruhi perataan laba. Penelitian Nirmanggi dan Muslih (2020) menunjukkan bahwa *operating profit margin*, *cash holding*, *bonus plan*, dan *income tax* terhadap perataan laba secara simultan dan signifikan memengaruhi perataan laba. Penelitian Lahaya (2017) menyimpulkan bahwa *dividend payout ratio*, risiko keuangan, nilai perusahaan yang diproksikan dengan *PBV*, dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset terhadap perataan laba secara simultan dan signifikan memengaruhi perataan laba.

Penelitian Megarani *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa *tax planning*, *company value* yang diproksikan dengan *PBV*, dan *leverage* terhadap perataan laba secara simultan memengaruhi perataan laba. Penelitian Sekartini *et al.* (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan *Free Cash Flow (FCF)* terhadap perataan laba secara simultan memengaruhi perataan laba.

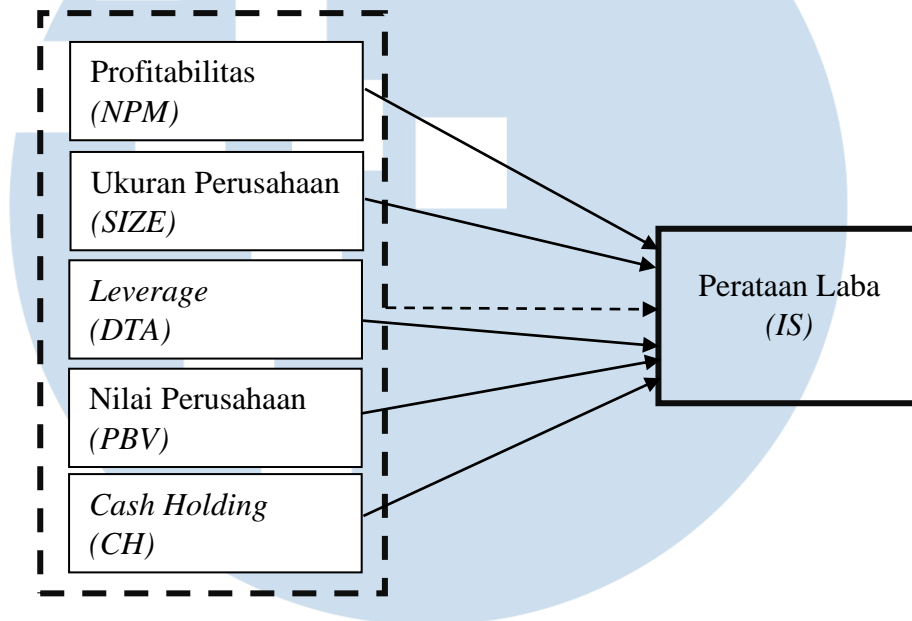
UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## 2.16 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori dan hipotesis yang telah dipaparkan adalah:

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**



UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA